

Perempuan Bugis: Dinamika Aktualisasi Gender Di Sulawesi Selatan

Andi Ima Kesuma¹, Irwan²

Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar

Email: andi.ima.kesuma@unm.ac.id¹, irwanunsa212@gmail.com²

Abstrak. Peranan, status, kedudukan, dan fungsi kaum perempuan dalam dinamika kehidupan dalam berbagai aspek sampai saat ini masih sangat strategis dan menarik untuk dikaji. Penelitian ini bertujuan untuk membedah dan menganalisis bagaimana peran, status, dan fungsi kaum perempuan dalam pandangan dunia tradisional pada masyarakat di Sulawesi Selatan khususnya pada masyarakat Bugis-Makassar baik dalam lontara maupun dalam pappaseng. Khusus dalam hal ini tidak mengkaji I La Galigo sebagai salah satu sumber karena sudah difokuskan pada tulisan yang lain. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan mengkaji lembar-lembar pustaka dalam berbagai kriteria mulai dari buku, laporan penelitian, artikel jurnal, dan lain-lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada masa lalu masyarakat di Sulawesi Selatan terdapat dinamika yang selalu beriringan dengan jiwa zaman, namun secara historis sejak abad ke-18 bagaimana peranan, status, kedudukan, dan fungsi kaum perempuan sudah sangat tinggi apabila dibandingkan dengan bagaimana gambaran tersebut di daerah dan etnis lainnya di nusantara. Meskipun dalam hal ini apa yang disampaikan dalam pappaseng terkadang tidak sejalan dengan realitas historis yang ada, karena lebih merupakan pandangan pribadi daripada realitas empiris dalam perkembangan sejarah di Sulawesi Selatan.

Kata Kunci: Perempuan Bugis, Lontara, Gender.

Abstract. The role, status, position and function of women in the dynamics of life in various aspects is still very strategic and interesting to study. This study aims to dissect and analyze how the role, status and function of women in the traditional worldview in communities in South Sulawesi, especially in the Bugis-Makassar community both in lontara and in pappaseng. Specifically in this case it does not examine I La Galigo as one source because it has focused on other writings. The research method used is library research by examining literature pages in various criteria ranging from books, research reports, journal articles, and others. The results show that in the past the people of South Sulawesi have dynamics that always go hand in hand with the spirit of the times, but historically since the 18th century how the role, status, position, and function of women has been very high when compared to how the picture in the area and other ethnic groups in the archipelago. Although in this case what is conveyed in Pappaseng is sometimes not in line with the existing historical reality, because it is more a personal view than an empirical reality in the development of history in South Sulawesi.

Keywords: Bugis women, Lontara, Gender

PENDAHULUAN

Peranan laki dan perempuan dalam suatu diskursus yang biasa dianalisis melalui kajian gender meskipun sudah tidak asing namun masih tetap relevan sampai saat ini. Masih terdapat lubang-lubang kosong yang memerlukan pengkajian dengan analisis yang berbeda sehingga akan dapat mewarnai khazanah dan analisis gender yang dominan selama ini.

Konsep gender sendiri merupakan konstruk sosial dan budaya yang membedakan perlakuan antara laki-laki dengan kaum perempuan yang bisa jadi di dalamnya terdapat kecenderungan berpihak baik pada kaum perempuan maupun pada laki-laki, sehingga unsur jenis kelamin ini tidak menjadi persoalan mendasar. Namun karena kecenderungan selama ini perempuan dianggap dan dijadikan sebagai "second class" maka sering salah dipahami bahwa kajian gender mengarah pada kaum perempuan saja.

Pentingnya pengkajian dan penelitian gender ini tidak lepas dari pemahaman adanya

bias gender. Bias gender sendiri dipandang sebagai sebab terjadinya ketidakadilan gender yang merupakan konstruksi sosial dan budaya yang menampilkan perbedaan status, peran dan fungsi antara laki-laki dan perempuan dalam masyarakat (Rabihatun, 2008: 18). Dalam status, peran dan fungsi antara kedua jenis kelamin tersebut dimana lingkup dominasi laki-laki mencakup banyak aspek, mulai dari pengambilan keputusan soal jumlah anak, persoalan masyarakat, pendidikan, industri, kesehatan, budaya, politik, militer, hingga persoalan pemahaman agama (Murtakhamah, 2006: 34).

Setiap bangsa dengan beragam suku, bahasa, dan agama memiliki kekhasan dan keunikan tersendiri dalam memahami status, peran, dan fungsi antara laki-laki dan perempuan. Masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan sebagai salah satu contoh, dengan sejarah yang panjang memiliki kekhasan tersendiri dalam praktek maupun pemahaman mengenai status, peranan, dan fungsi antara kaum laki-laki dan perempuan

ini yang pada akhirnya dianggap sebagai sebuah keniscayaan dan kebaikan bersama.

Perbedaan status, peran, dan fungsi antara laki-laki dan perempuan pada masyarakat Bugis pada dalam perkembangan sejarah dan budayanya banyak tertuang dalam naskah-naskah kuno meskipun dalam porsi yang sangat sedikit. Karena semua naskah kuno tersebut memang tidak bertujuan untuk memberikan penjelasan yang demikian, disamping tentunya wacana dan diskursus gender yang berkembang saat ini tidak pernah terpikirkan sebelumnya sehingga penjelasannya lebih pada nilai-nilai sosial, budaya, politik, ekonomi dan lain-lain yang sifatnya umum.

Adapun lontarak yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan beberapa Pappaseng yang di dalamnya tertuang nilai-nilai kabajikan yang di dalamnya juga meskipun sedikit menyinggung peranan antara laki-laki dengan perempuan mulai dari kedudukan dalam rumah tangga, politik, dan kebudayaan. Naskah-naskah tradisional ini penting untuk memahami relasi gender tersebut pada masyarakat Bugis di Sulawesi Selatan, baik dalam memahami nuansa dan dinamika kelampauan sekaligus menarik benang merah untuk memberikan warna terbaik dalam menjalankan kehidupan dewasa ini.

Disamping naskah-naskah tradisional tersebut, perjalanan sejarah kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan memperlihatkan adanya peranan kaum perempuan yang begitu penting baik terutama sekali dalam aspek politik dan proses sosial budaya yang ada di dalamnya. Andi Ima Kesuma (2010) dalam pengukuhan sebagai Guru Besar Antropologi dan Sejarah di UNM menganggap bahwa peranan kaum perempuan dalam merajut hubungan geneologis sangat penting dalam memberikan harmonisasi antara berbagai kerajaanan di Sulawesi Selatan. Analisa politik yang diistilahkan dengan "Politik Ranjang Bugis" ini dapat ditelusuri melalui dalam hubungan geneologis baik antara kerajaan yang ada di Sulawesi maupun di luarnya.

Konstruksi sosial dan budaya masa lalu dengan masa kini yang dalam istilah Sartono Kartodirdjo (1992) memiliki perbedaan yang disebabkan adanya *'zeit geist'* (jiwa zaman) yang mempengaruhi, sehingga apa yang dahulunya biasa-biasa saja dan bahkan dianggap baik, saat ini sudah dianggap kurang baik atau tidak relevan. Artinya bahwa konsep kelampauan tidak semuanya dapat diwariskan dalam alam modern kecuali sebagai bagian dari pemahaman untuk masa lalu itu sendiri.

Adapun permasalahan yang akan diteliti dalam tulisan ini berkaitan dengan bagaimana status, peranan, dan fungsi kaum perempuan

tradisional pada suku Bugis. Tujuannya tidak lain untuk menemukan relevansi status, peranan, dan fungsi tersebut dalam kehidupan kaum perempuan khususnya pada masyarakat Etnis Bugis dewasa ini. Terdapat banyak hal yang dapat menjadi pembelajaran bagaimaka kedudukan kaum perempuan suku Bugis pada masa lalu, semuanya itu tentunya dapat menjadi pembelajaran berharga pada saat ini.

Urgensi dari tulisan ini tidak lain untuk mencari dan menemukan nilai budaya bagaimana status, peran, dan fungsi kaum perempuan pada masyarakat Bugis sehingga membentuk keberadaan kaum perempuan dewasa ini. Tentu saja tidak semua nilai-nilai tradisional tersebut memiliki relevansi dengan kebutuhan dan keberadaan kaum perempuan di era disrupsi ini. Hanya saja semua itu dapat menjadi acuan untuk status, peran, dan fungsi yang jauh lebih baik. Hasil temuan dan analisis dari penelitian ini sekaligus dapat memberikan masukan dalam pengembangan sosial kebudayaan masyarakat suku Bugis pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Sebagai penekanan, beberapa sumber yang digunakan dalam tulisan ini yaitu pappaseng dan beberapa lontara lainnya tanpa menggunakan lontara I La Galigo sebagai salah satu sumber pembandingan. Khusus untuk tulisan yang menggunakan I La Galigo sebagai fokus kajian perlu mendapatkan tempat yang khusus dan tersendiri sehingga pembahasannya lebih dalam.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan ini menurut Mestika Zed (2014) bahwa penelitian kepustakaan sendiri menekankan pada usaha peneliti dalam menggunakan sumber dengan cara yang profesional dan jeli mulai dari membuat catatan penelitian sampai pada bibliografi kerja.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum

Secara umum di Sulawesi Selatan terdapat empat suku pribumi, yaitu suku Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar. Dari keempat suku tersebut yang mendominasi adalah Bugis dan Makassar. Dan diantara keduanya (Bugis dan Makassar), orang Bugis merupakan etnis terbesar (Hasse, 2009: 234; Kesuma dan Lalu Murdi, 2015: 156). Lebih rinci lagi Swasono (2014: 43), bahwa di Sulawesi Selatan selain keberadaan 4 (empat) etnis yang disebutkan sebelumnya, terdapat juga beberapa suku lainnya seperti Abung Bunga

Mayang, Bentong, Daya, Duri, Luwu, Massenrengpulu, Selayar, Toala, dan Towala-Wala.

Berkaitan dengan dengan status, peran, dan fungsi kaum perempuan dalam konstruk sosial baik yang dapat diperhatikan dalam realitas normatif maupun empiris memiliki dinamikanya tersendiri dalam perkembangan sejarah yang perbedaannya dengan kedudukan kaum perempuan di nusantara pada waktu yang sama. Bahkan pada abad ke-18 dimana pada saat itu hampir dapat dipastikan bahwa di seluruh nusantara masih terjadi stereotipe pada kaum perempuan, hal ini berbeda pada masyarakat Suku Bugis. Kaitannya dengan hal ini dalam Buku *History of Java* (1817), Thomas Stanford Raffles mencatat kesan kagum akan peran perempuan Bugis dalam masyarakatnya: "Perempuan Bugis Makassar menempati posisi yang lebih terhormat daripada yang disangkakan, mereka tidak mengalami tindakan kekerasan, pelanggaran privacy atau dipekerjakan paksa, sehingga membatasi aktivitas/kesuburan mereka, dibanding yang dialami kaumnya di belahan dunia lain" (Mantik, 2013: 439).

Informasi yang sama dijelaskan oleh Andaya (2010: 58), dengan mengatakan bahwa "Meski demikian, tak pernah mudah untuk memperoleh contoh-contoh stereotip "perempuan Bugis yang kuat". Hal ini tentunya mengherankan, karena seorang bisa saja berasumsi bahwa hal ini akan menjadi sedikit bisa terlihat pada pagian barat kepulauan Nusantara".

Catatan ini menunjukkan bahwa pada waktu yang sama, apabila dibandingkan dengan status, peranan, dan fungsi kaum perempuan pada masyarakat Bugis memiliki perkembangan dan kemajuan yang jauh di atas perempuan pada suku yang berbeda di nusantara. Hal ini tentu dapat ditelusuri dari beberapa hasil penelitian tentang kaum perempuan di daerah yang berbeda. Perkembangan ini tentu saja tidak lepas dari praktik adat-istiadat yang berlaku di Sulawesi dan pada masyarakat Bugis pada umumnya.

Pada masyarakat Bugis pembagian identitas gender sendiri terbagi menjadi lima, semua diakui dan mempunyai peran masing-masing. Mereka menentukan diri sebagai perempuan (*Makkunrai*), laki-laki (*orowane*), laki-laki feminin (*Calebai*), perempuan maskulin (*Calalai*) dan Bisu (gabungan antara laki-laki dan perempuan). Hal ini berkembang sesuai dengan kecendrungan yang dirasakan dari kecil dan pengaruh dari lingkungan sekitar (Nurohim, 2018: 459).

b. Perempuan dalam Pappaseng

Pappaseng atau pappasang merupakan himpunan pesan, wasiat, amanat atau patuah dari kaum sulesana (cerdik-pandai) Sulawesi Selatan masa lalu yang mencerminkan pandangan hidup dan pola pikir mereka tentang berbagai hal berkaitan dengan kelangsungan hidupnya (Rahim, 2012: 15). Lebih lanjut dijelaskan bahwa "*Pappaseng (pappasang)* menggunakan bahasa daerah masing-masing etnik yang ada di Sulawesi Selatan sebagai medianya, merupakan sumber telaahan yang kaya akan nilai-nilai kepemimpinan, demokrasi, moralitas, martabat, etos kerja dan lain sebagainya. Biasanya, *pappaseng* tersebut disampaikan turun-temurun dari generasi ke generasi, dari orang tua kepada anak cucunya atau kepada kerabat dan orang-orang dekat lainnya (Rahim, 2012: 15). Secara keseluruhan *pappaseng* merupakan wujud ide yang terbentuk dari adat-istiadat yang berlaku secara normatif pada masyarakat di Sulawesi Selatan, dimana wujud ide tersebut bisa saja merupakan bagian dari masa ketika pappaseng tersebut disampaikan atau merupakan hukum adat yang sudah lama namun banyak dilakukan penyelewengan sehingga para cerdik pandai mengemukakan hal itu lagi paling tidak sebagai bagian dari perbaikan sistem sosial yang sedang terjadi untuk disesuaikan dengan ketentuan adat-istiadat lama yang dianggap lebih sesuai.

Pappaseng pada dasarnya seperti yang diungkapkan Abdul Rahim (2012: 14-15) merupakan "sebuah wujud *idea* dari budaya manusia Sulawesi Selatan, adalah sastra tradisi lisan yang lazim disebut *pappaseng* (Bugis) atau *pappasang* (Makassar) yang berarti pesan, wasiat, amanat, atau petuah. Cara menyampaikan tradisi lisan ini biasa disebut *maggaigo*, namun pada perkembangan kemudian, pappaseng dihipunkan dalam bentuk naskah yang disebut *lontara*', sehingga setiap orang dapat membacanya, bahkan melakukan berbagai kajian terhadapnya.

Secara garis besar berikut beberapa hal yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan bagaimana status, kedudukan, dan fungsi kaum perempuan dalam kehidupan menurut *pappaseng*. Pengidentifikasian ini sifatnya masih sangat longgar dalam arti tidak dilakukan pengecekan atau perbandingan dengan dokumen atau sumber lain.

1. Kedudukan Perempuan Sebagai Pemimpin Kerajaan

Di Sulawesi Selatan, hampir sama dengan beberapa suku dan etnis lain di Nusantara bahwa pada masa lalunya yang paling berhak menjadi seorang raja adalah kaum laki-laki. Bahkan ada beberapa

perkara dimana keterlibatan perempuan di dalamnya dianggap kurang baik (untuk ukuran saat ini). Kaitannya dengan ini jelas dalam Pappasenna Nene' Allomo ri Sidenreng yang mengatakan bahwa:

Eppa'i tau tenrjala arung pattuppu batu ri tana marajaE enrengnge tana bicu'E. Seuwani, anana'E. Maduanna, makkunaraE. Matellunna, tau ujangengnge. Mappa'na, tau bongngo'E (Empat orang yang tidak dapat dijadikan raja di negeri besar maupun negeri kecil. Pertama, anak-anak. Kedua, perempuan. Ketiga, orang gila. Keempat, orang dungu (Rahim, 2012: 53-54).

Perempuan dalam pandangan ini tidak boleh menjadi seorang raja, karena yang berhak menjadi raja adalah dari kaum laki-laki. Meskipun demikian, dalam konteks historisnya kaum perempuan yang berkedudukan sebagai ratu tidak kurang peranannya dalam membangun dan mengembangkan sebuah kerajaan.

Berkata Karaeng MatowaE ri Gowa (Rahim, 2012: 135), bahwa ada tiga hal yang menjadi sumber penyakit bagi negeri:

Pertama, jika Raja bertahta membenci rakyatnya, juga kepada keluarganya (*Seuwani; rekko mabbacciwi Arung Mangkau'E ri pabbannuaE kuaetopa seajinna*).

Kedua, jika bersandar pada pendapat perempuan (*Maduanna; rekko maddenrengge ri tangnga' makkunaraE*).

Ketiga, jika rakyat dalam negeri sudah menyebar meninggalkan tuannya (*Matellunna; rekko mallebbanni to maegaE ri puanna*).

Maksud dari pernyataan tersebut tidak dapat ditafsirkan secara tekstual, namun harus dimaknai dengan kearifan masyarakat pada masa itu, karena satu hal yang menyebabkan perempuan tidak dapat dijadikan pijakan pendapat pada perkara tertentu karena sifatnya yang lebih banyak menggunakan perasaan, dan perasaan tersebut seiring datang tiba-tiba seperti marah, sedih, dan lain-lain. Misalnya dalam hal ini seperti dikatakan Nenek Allomo: "*Naiya riasengnge gau' makkunrai paggelli-gellingnge tenrisseng appongenna na marakka mpaliri ada enrengnge gau', naelori mawai sopappau sipatengngareng makkunraE (yang dimaksud perbuatan perempuan, ialah pemarah tanpa sebabnya*

dan gemar berbicara meminta pertimbangan kepada perempuan)" (Rahim, 2012: 55-56).

Meskipun demikian, dan memang hal ini dianggap hal yang biasa pada masyarakat tradisional bahwa kaum perempuan dianggap lebih malas, lemah, dan rapuh. Tentu saja hal ini semakin mendukung adanya anggapan *the second sex* pada kaum perempuan. Artinya bahwa secara tradisional perempuan dianggap kurang penting bahkan dapat mengganggu dalam beberapa urusan kerajaan apabila dilibatkan tidak lepas dari adanya sudut pandang yang menganggap kaum perempuan kurang berkualitas untuk mengurus kerajaan seperti kaum laki-laki. Pappasenna Arung Bila atau wasiat Arung Bila mempertegas hal ini dengan mengatakan sebagai berikut:

Eppa'toi uwangenna orowane, nariaseng massipa' makkunrai tennaribilang orowane. Seuwani, makuttui. Maduanna, maleai. Matellunna, bongngo'i. Maeppa'na, bebe'i.

'Empat macam juga perbuatan laki-laki sehingga disebut bersifat perempuan. Tidak terhitung sebagai laki-laki. Pertama, malas. Kedua, lemah, rapuh. Ketiga, dungu. Keempat, bebal (Rahim, 2012: 87).

Pernyataan ini secara tekstual bertujuan untuk memberikan arahan kepada kaum laki-laki. Namun secara tersirat sekaligus secara tradisional kaum perempuan dianggap kurang produktif apa lagi untuk mengurus hal-hal penting dari persoalan kerajaan. Kata-kata seperti pemalas, lemah/rapuh, dungu, tentu saja merupakan anggapan yang secara tradisional dianggap lumrah.

Keberadaan perempuan yang tidak dapat menjadi raja dijelaskan juga oleh Halilintar Latif (2014: 47), bahwa pelapisan masyarakat Bugis-Makassar salah satu dari beberapa poin yaitu "Hanya anggota laki-laki dari *Anak Tikno* dapat dipilih menjadi *somba* (raja) yang dianggap masih berdarah *Tu-Manurung*". Apa yang disampaikan oleh Halilintar Latif ini sejara jelas mengantarkan kita pada satu pemahaman bahwa baik pappaseng maupun konteks realitas historis pada masyarakat awal di Sulawesi Selatan hanya memberikan tugas sebagai raja pada kaum laki-laki sedangkan perempuan hanya sebagai ratu

yang bisa saja dianggap kebanyakan sebagai objek.

2. Perbedaan antara Laki-Laki dengan Perempuan dari Sifatnya

Sifat yang bersumber dalam diri perempuan secara inheren berbeda dengan laki-laki, sehingga ada banyak hal yang memang tidak bisa sama antara laki-laki dengan perempuan. Perbedaan sifat dan psikologis dalam banyak hal ini sekali lagi dapat mempengaruhi adanya perbedaan status, peranan, dan fungsi antara kedua jenis kelamin tersebut, meskipun banyak juga perbedaan yang terjadi merupakan konstruk sosial yang tidak berkaitan dengan biologis maupun psikis. Tentu saja yang sering dan menjadi persoalan tersendiri adalah konstruk sosial yang berbeda tersebut, bukan pada adanya perbedaan yang diakibatkan oleh faktor fisik dan psikis.

Berkaitan dengan sifat, perempuan digambarkan sebagai makhluk yang lebih banyak menggunakan perasaan dibandingkan dengan rasionalitas, misalnya mudah dan cepat menangis, bahkan dengan atau sebab yang tidak diketahui secara pasti. Dalam hal ini Pappasenna Nene' Allomo Sidenreng atau Wasiat Nenek Allomo Sedenreng, mengatakan bahwa:

Naiya raisengnge gau' makkunrai
paggeli-gellingnge tenrisseng
appongenna na marakka mpaliri ada
enrengnge gau', naelori mewai
sipappau sipatangngereng
makkunraiE.

Yang dimaksud perbuatan perempuan, ialah pamarah tanpa diketahui sebabnya dan gemar berbicara minta pertimbangan kepada perempuan (Rahim, 2012: 55-56).

Meskipun pesan tersebut untuk menggambarkan sifat seorang laki-laki apabila melakukan perbuatan yang demikian maka laki-laki tersebut cenderung memiliki sifat feminim. Namun cukup untuk memahami bahwa hal tersebut merupakan persepsi dari yang membuat pesan bahwa perempuan lebih banyak menggunakan perasaannya sehingga mudah untuk menangis, sedih, maupun gembira. Adanya perbedaan inilah yang menyebabkan nasehat tersebut pada dasarnya dalam keadaan tertentu dapat ada manfaatnya.

Terlepas dari beragam tafsiran tersebut, secara keseluruhan terdapat

beberapa pesan dalam teks tersebut yang dapat diidentifikasi yaitu sebagai berikut:

1. Perempuan tidak boleh menjadi raja, mungkin hal ini berkaitan dengan sifat perempuan yang sering terbawa perasaan seperti yang diungkapkan oleh pappaseng.
2. Seorang raja tidak boleh memiliki beberapa sifat seperti yang dimiliki oleh perempuan. Namun tentu saja dalam hal ini maksud dari pappaseng tersebut hanya beberapa dari sifat perempuan yang memang harus dihindari oleh seorang raja seperti lemah.
3. Terdapat pernyataan-pernyataan pappaseng yang memberikan konotasi-konotasi yang kurang baik pada perempuan seperti bebal, pemalas, dan lain-lain.

c. Perempuan dalam Naskah Lontara Lainnya

Berikut beberapa hal yang dapat diidentifikasi berkaitan dengan bagaimana status, peranan, dan fungsi kaum perempuan yang dapat dianalisis dalam berbagai lontara'. Apa yang digambarkan di bawah ini hanya sebagian kecil dari informasi yang sebenarnya cukup banyak, hanya saja keterbatasan waktu dan sumber sehingga apa yang disampaikan di bawah ini semacam gambaran umum dari apa yang di dapatkan dari beberapa sumber tersebut.

1. Kehormatan kaum perempuan

Status perempuan dan laki-laki pada masyarakat Bugis sudah cukup jelas terungkap dari budaya masa lalunya baik yang didapatkan dari tradisi tulis maupun tradisi lisan yang di kemudian hari menjadi bagian dari dokumen tertulis juga. Meskipun dalam prakteknya terdapat perbedaan, namun perbedaan tersebut dijalankan dengan rasa bangga dan kehormatan. Dalam hal ini misalnya diambil dari kumpulan Andi Palloge Petta Nabba (Machmud, 2015: 49), menjelaskan:

*E makkunrai sappo'i alemu nasaba siri
mu, e worowane sappoi alemu nasaba
asabbarakeng.*

Terjemahan:

Hai perempuan pagari dirimu demi kehormatanmu, hai pria pagari dirimu demi kesabaranmu.

Menurut Machmud (2015: 49-50), pernyataan tersebut menunjukkan bahwa "karena siri" seorang wanita menjaga tingkah laku dan kehormatannya, sehingga terhindarlah dari celaan. Demikian pula halnya seorang pria akan menahan diri dari tindakan yang tercela dengan kesabaran.

Kajian yang cukup mendalam dilakukan oleh Gusnayati yang secara langsung menggali sumber dari lontara asli mengenai bagaimana perempuan khususnya perempuan bangsawan menjaga kehormatannya. Judul lontara dikaji Gusnayati (tulisan tanpa tahun) adalah "*Pengajana Arung Makkunrai e' Nasehat Bagi Bangsawan Perempuan*". Terdapat beberapa hal yang menurut naskah ini sebaiknya menjadi pegangan perempuan bangsawan supaya dihormati oleh masyarakatnya, diantara beberapa hal tersebut diidentifikasi Gusnayati sebagai berikut:

1. Jangan melakukan selingkuh sebab kebangsawananmu akan rusak dan rusak pula citramu (*'Ajaq mupogauq sapatana, mosolongngi ritu akkarungngemmu, erengnge ri watakkalemu*).
2. Jangan hidup bersama dengan orang yang status sosialnya lebih rendah darimu.
3. Jangan hidup bersama dengan orang yang status sosialnya sama denganmu.

Disamping larangan di atas, masih pada kajian yang dilakukan oleh Gusnayati pada lontara yang sama. Kaum perempuan bangsawan yang belum menikah juga dilarang bergaul dengan orang-orang yang memiliki sifat kurang baik/jelek, karena ada hal yang kurang baik apabila bergaul dengan mereka, diantaranya:

1. Bila mereka memberitahukan sifat-sifat jelek.
2. Bila mereka memberitahukan ajaran-ajaran yang jelek.
3. Bila mereka membayar hamba perempuan, atau mendekati keluarganya agar perempuan bangsawan itu berperilaku tidak semestinya. Di sini ditekankan agar berhati-hati pada keluarga, sebab biasanya yang mengajak untuk berbuat tidak semestinya adalah orang dekat dan tidak pernah dipikirkan akan mempengaruhi kita.

Apa yang disampaikan oleh lontara yang dikaji oleh Gusnayati di atas lebih pada saran dan informasi normatif, atau semacam nasehat seperti banyak papaseng lainnya yang akan dibahas pada bagian selanjutnya. Lebih dari itu, nasehat-nasehat semacam ini dari lontara lebih banyak berkaitan dengan nasehat secara umum baik untuk laki-laki maupun perempuan.

Satu hal yang cukup mendasar pada nasihat di atas adalah pada poin ke 3, yang menekankan pada kehati-hatian pada para pembantu rumah tangga, karena bisa saja kalau tidak hati-hati dalam menghadapinya terutama

ketika nantinya bisa saja memiliki niat yang kurang baik dan dapat mempengaruhi satu atau dua diantara keluarga sehingga terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Terdapat *elong* (nyanyian) yang menggambarkan kesiapan seseorang laki-laki dan seorang perempuan untuk memasuki/ atau menaiki jenjang perkawinan, yaitu sebagai berikut:

*Tau laloni la Baso
Tappiaqni gajang
Mola toni pallawangeng
Anaq darani I Besse*

*Passani Waju
Taro toni leppeq lipa*
Artinya:

Telah jejak la Baso
Telah menjepit senjata
Pun telah tumpah kembara
Telah gadis I Basse
Telah memakai baju

Pun telah menyimpang lipatan sarung
(Kesuma, 2015: 37-38).

Nyatalah kedewasaan seorang lelaki disimbolkan pada dua hal, pertama, apabila sudah menjepit senjata (badik atau keris), artinya telah sanggup menjaga dirinya dari setiap ancaman bahaya, kedua; pun telah tumpah kembara (bepergian, merantau, mencari rizeki), artinya telah mempunyai mata pencaharian yang tetap, yaitu baik sebagai petani, nelayan, maupun pedagang.

Demikian pula halnya dengan seorang perempuan disimbolkan pada dua hal, pertama; apabila telah memakai baju, artinya dapat membebani diri sebagaimana mestinya, kedua; pun telah simpang sarung, artinya telah mampu menenun kain sarung maupun kain baju, yang dalam arti konotatifnya telah mampu mengatur rumah tangga (memasak, membikin kue, menjahit, dll).

Secara umum, meskipun informasi tersebut pada dasarnya semakin memperjelas status, kedudukan, dan fungsi kaum perempuan dalam rumah tangga yang cenderung untuk bekerja di sektor domestik, hal ini memiliki makna dan keuntungan tersendiri baik pada kaum laki-laki dan kaum perempuan. Kesadaran agama, kesadaran budaya, dan tentu saja nilai keindahan yang terdapat di dalamnya menyebabkan konstruk sosial ini bahkan masih berlaku sampai saat ini meskipun dengan perkembangan yang cukup signifikan.

2. Perempuan dalam stratifikasi sosial dan sistem pernikahan

Gambaran sistem perkawinan berdasarkan strata sosial yang lebih memberatkan kaum perempuan tersebut dijelaskan oleh Andi Ima Kesuma (2015: 40) sebagai berikut: "Pada masa

masih berdirinya Kerajaan Luwu, masalah pelapisan masyarakat/ stratifikasi sosial mempengaruhi sifat perkawinan. Terutama bangsawan perempuan tidak boleh kawin/menikah dengan laki-laki yang tidak sederajat. Tetapi sebaliknya lelaki bangsawan boleh saja menikah dengan perempuan yang tidak sederajat". Sekali lagi sebagai penguatan, hal ini berlaku hampir di sebagian besar masyarakat di nusantara pada saat itu, dimana laki-laki secara umum diberikan keluasaan untuk menikah dengan perempuan yang stratifikasi sosialnya dianggap lebih rendah, sedangkan perempuan dengan status sosial tertentu tidak diperbolehkan untuk menikah dengan perempuan yang status sosialnya lebih rendah.

Lebih lanjut Andi Ima Kesuma (2015: 40), menguraikan bahwa menurut tingkat stratifikasi sosial perempuan dan seorang lelaki bangsawan mempunyai sebutan istri yang berlainan sebutannya, terdiri dari:

1. *Bene pada*, yakni istri yang sederajat tingkat kebangsawanan suaminya.
2. *Bene seajing*, yakni istri yang tidak sederajat tingkat kebangsawanan suaminya.
3. *Bene torilao*, yakni istri yang tidak memiliki derajat kebangsawanan, yakni terdiri atas tiga tingkatan kebawah, yakni *bene maradeka*, *bene sama*, dan *bene ata*.

Mengomentari beberapa pernyataan sebelumnya, lenih lanjut Andi Ima Kesuma (2015: 40), mengatakan "sesungguhnya model ini sebenarnya telah menyebabkan dampak negatif dalam tataran perkawinan perempuan bangsawan, dimana mereka terkadang sampai tua akibat tatanan adat perkawinan ini tidak menikah". Tentu sekali lagi apabila kembali pada jiwa zaman, mungkin hal ini dianggap lumrah oleh kaum perempuan.

Meskipun demikian, secara adat seorang peria juga terbatas untuk bisa menikahi perempuan dengan status sosial yang lebih tinggi. Meskipun demikian, tidak ada hukuman yang berat bagi mereka ketika terjadi pernikahan, karena tetap saja yang akan mendapatkan hukuman adat adalah perempuannya. Halilantar Lathief (2014: 47), dalam hal ini menjelaskan bahwa "Seorang pria dari lapisan tertentu boleh mengawini seorang wanita dari lapisan yang sama atau dari lapisan yang lebih rendah, tetapi terlarang baginya untuk kawin dengan seorang perempuan dari lapisan yang lebih tinggi".

Disamping berkaitan dengan sistem pernikahan dalam setratifikasi sosial yang menurut ukuran saat ini "terdapat ketidakadilan" pada kaum perempuan, lontara juga memberikan

pesan bagaimana seharusnya perempuan bangsawan dalam berperilaku dan masyarakat memperlakukannya. Berikut petikan yang peneliti kutif dari kajian lontara yang dilakukan Gusnayati sebagai berikut:

Perempuan yang belum menikah itu menurut naskah ini ibarat kaca atau gelas bila sudah ada berita jelek yang beredar tentangnya, maka diibaratkan mereka sudah retak, dan apabila mereka sudah terbukti melakukan perbuatan yang tidak semestinya maka mereka dianggap sudah pecah, sudah tidak berguna lagi.

(*Iyanaé bicaranna nako arung wélampelang bettuwannan deqpa nallakki iko tomatuwa iyyengngi aggangka elléyangngi mmatuwi. Apaq iyaritu riasengngé arung makkunrai. Riyebaraq i kaca. Iyana engkana biritta temmadécénna, riyébaraqnitu malleseq. Narékko mannessani pangkaunenna, iyébaraqni padatosa kacaé, reppaqni, Dena buwuq-bawaqna*).

Nasehat ini memberikan pesan yang sangat berarti pada kaum perempuan khususnya bangsawan untung sangat berhati-hati terutama dalam bergaul sehingga perbuatannya tidak cacat sesuai dengan adat, hal tersebut lebih banyak dapat dilakukan oleh perempuan bangsawan yang belum menikah, sehingga dalam bergaul mereka harus hati-hati dan menjaga jarak.

Begitu juga dengan pergaulan dengan laki-laki lain terutama sebelum menikah maupun setelahnya, seorang perempuan harus menjaga jarak kalau bukan dengan suaminya, hal ini bertujuan untuk menjaga kehormatan perempuan tersebut, terlebih lagi apabila dia seorang putri raja atau pembesar kerajaan. Dalam hal ini Gusnayati menguraikan sebagai berikut:

"Perempuan dilarang didekati oleh laki-laki walaupun mereka adalah pengawalnya atau saudara laki-lakinya yang sudah disunat. Sebab perempuan itu diibaratkan kayu basah dan laki-laki itu diibaratkan api yang menyala. Walau kayu masih basah bila terus-menerus berada di dekat api yang menyala maka kayu-kayu tersebut akan terbakar juga. Seperti yang tergambar dalam lontara sebagai berikut:

(*...Apaq iyaritu nabiya naddeppéri worowané makkunraiye uwalamuto ébaraq iyamakkunraiye rirapangngi mamata. Naiya worowané rirapangngi bara opinamasuwa. Namauni mamata ajuwé, naddeppéri wara apiyé nanrémuwatu api paggangkanna*).

Nasihat di atas penekanannya lebih pada batas pergaulan antara laki-laki dan perempuan, kesempatan terkadang memberi ruang untuk melakukan hal-hal yang dilarang untuk melakukan sesuatu perbuatan yang tidak diinginkan. Sehingga perempuan secara umum bukan hanya mereka yang bangsawan, secara keseluruhan harus memperhatikan nasehat tersebut.

Selain berbicara tentang nasehat, masih dalam sistem perkawinan, beberapa sumber juga menunjukkan bahwa kaum perempuan dalam strata sosialnya memiliki perbedaan jumlah uang *panai* yang harus dibayar oleh pihak laki-laki. Yansa, dkk (2016: 526), menjelaskan bahwa "secara sosial wanita mempunyai kedudukan yang tinggi dan dihormati. Secara keseluruhan uang *panai* merupakan hadiah yang diberikan calon mempelai laki-laki kepada calon istrinya untuk memenuhi keperluan pernikahan". Lebih lanjut dijelaskan bahwa "makna sebenarnya yang terkandung dalam uang *panai* adalah bentuk penghargaan dan kerja keras seseorang laki-laki" (Yansa, dkk. 2016: 530). Semakin tinggi tingkatan kebangsawannya maka semakin tinggi uang *panai*-nya.

KESIMPULAN

Setiap suku bangsa yang berbeda memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri dalam perjalanan sejarahnya, hal ini tentu tidak lepas dari perbedaan kebudayaan yang mempengaruhinya. Kebudayaan Bugis dalam hal ini sudah banyak menjadi kajian yang menarik bukan hanya bagi ahli lokal namun sudah menjadi bagian dari bidikilmiah para ahli dunia.

Bagaimana perempuan suku Bugis pada masa lalunya dapat dianalisa dari berbagai sumber baik yang sifatnya normatif maupun empiris. Informasi normatif dapat diperoleh dari dokumen-dokumen lontara baik yang bersumber dari tradisi tulis maupun yang bersumber dari tradisi lisan dalam bentuk *pappaseng*. Sedangkan informasi mengenai realitas empiris dapat dianalisis dalam catatan sejarah yang banyak menjadi perhatian para sejarawan. Catatan sejarah ini menurut peneliti pada dasarnya jauh lebih penting sebagai dokumen yang dapat diperifikasi secara ilmiah, sedangkan beberapa lontara dapat dijadikan sumber untuk memahami faktor budaya yang mempengaruhi sistem kehidupan pada masa tersebut.

Antara lontara dengan *pappaseng* sebagai lontara sebenarnya memiliki cukup banyak perbedaan terutama dalam memahami realitas empiris dan realitas normatif. Karena memang harus dipahami pula bahwa untuk melihat dan memahami sejarah dalam waktu tertentu,

keberadaan sumber lisan sebagai bukti memang sering kurang akurat dan meyakinkan. Begitulah halnya dengan *pappaseng*, tidak bisa dijadikan sebagai realitas historis, kecuali pada beberapa hal dimana realitas normatif tersebut didukung oleh realitas empiris. Realitas normatif, seperti dalam *pappaseng* lebih banyak menekankan hal-hal yang ideal sesuai dengan adat, atau apa yang baik dan benar menurut adat, namun pada waktu yang bersamaan terkadang pada saat itu hukum adat sudah banyak berubah sehingga realitas normatif tersebut terkadang tidak nyambung dengan realitas empiris. Maka dalam hal ini peneliti sengaja tidak menekankan adanya kronologi sehingga tidak terjebak pada apa yang biasanya diistilahkan dengan "anakronisme sejarah", sehingga apa yang disampaikan dalam penelitian ini lebih pada bagaimana pandangan masyarakat pada masa lalu yang tidak pasti urutan kronologinya, dan pada dasarnya lebih merupakan kajian antropologi daripada kajian sejarah meskipun secara keseluruhan berbicara mengenai masa lalu itu sendiri. sekali lagi yang membedakannya dalam hal ini adalah penggunaan waktu dan tempat yang tidak jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Barbara, W. (2010). *Gender, Islam, dan Diaspora Bugis di Riau-Lingga: Sebuah Kajian Sastra Historis*. Dalam Andi Faisal Bakti (ed). *Diaspora Bugis di Alam Melayu Nusantara*. Makassar: Innawa.
- Gusnawati (TT). Karakter Perempuan dalam Naskah Lontarak Bugis di Sulawesi Selatan. TT: TP.
- Hamid, Abu, dkk. (2007). Sejarah Bone. Bone: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bone.
- Hamid, Abu. (2012). *Kebudayaan Bugis*. Makassar: Bidang Sejarah dan Purbakala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Sulse.
- Hasse, J. (2009). *Islam dan Adat di Tanah Bugis: Antara Konfrontasi dan Konformitas dalam Taufik Abdullah at.all, Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Kontemporer*. Yogyakarta: TICI Publication.
- Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia.
- Kesuma, A. I & Lalu Murdi. (2015). *Napas Budaya dari Timur Nusantara (Sejarah dan Sosial Budaya Masyarakat di Sulawesi dan Lombok-NTB)*. Mataram: Arga Puji Press.
- Kesuma, Andi. I. (2015). *Legacy Tana Luwu*. Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sulawesi Selatan.



PROSIDING SEMINAR NASIONAL LP2M UNM - 2019

"Peran Penelitian dalam Menunjang Percepatan Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia"

ISBN: 978-623-7496-14-4

- Lathief, Halilintar. (2014). *Orang Makassar*. Yogyakarta: Padat Jaya.
- Mentik, Maria, J. (2013). *Gender Inequality dalam "Makkunrai" Karya Lili Yulianti Farid*. Prociding The 5th International Conference on Indonesian Studis. "Ethnicity and Globalization".
- Nurohim, Sri. (2018). *Identitas dan Peran Gender pada Masyarakat Suku Bugis*. Jurnal Sosiotas , Vol. 8, No. 1, 2018.
- Rahim, Abdul. (2012). *Pappaseng Wujud Idea Budaya Bugis-Makassar*. Makassar: Bidang Sejarah dan Kepurbakalaan Disbudpar Sulsel.
- Swasono, Sri-Edi. (2014). *Kebangsaan Kerakyatan dan Kebudayaan*. Yogyakarta: UTS-Press.
- (2014). *Krisis Kepemimpinan Rezim Merampok Rakyat*. Yogyakarta: UTS-Press.
- Yansa, Hajra, dkk. (2016). *Uang Panai' dan Status Sosial Perempuan dalam Perspektif Budaya Siri' pada Perkawinan Suku Bugis Makassar Sulawesi Selatan*. Jurnal Pena, Vol. 3, No. 2.
- Zed, Mestika. (2014). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Komunitas Bambu.